



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN 2019

JL. PALOKO KINALANG
KELURAHAN KOTOBANGON

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

LKIP ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai bahan evaluasi pada perencanaan Anggaran kedepannya.

Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan LKIP Tahun 2019 ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun analisis yang dilakukan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaannya.

Akhir kata semoga LKIP ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Kotamobagu, Januari 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu



SITTI RAFIQAH BORA, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19700903 199903 2 002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu	1
1.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Organisasi	1
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	2
BAB II PERENCANAAN KERJA	4
2.1 Rencana Strategis SKPD	4
2.1.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu	4
2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	13
3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019	15
3.1.3 Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Tahun Akhir Renstra	15
3.2 Realisasi Anggaran	16
BAB IV PENUTUP	18
4.1 Kesimpulan	18
4.2 Saran Tindak Lanjut	18
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu

1.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dasar hukum pembentukan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 54 Tahun 2016, adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi 2 (dua) sub bagian terdiri dari :
 - Kepala Sub bagian program dan keuangan;
 - Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian ;
- c. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga membawahi 2 (dua) seksi sebagai berikut :
 - Kepala Seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga;
 - Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Ekonomi, Politik dan Hukum;
- d. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak membawahi 2 (dua) seksi sebagai berikut :
 - Kepala Seksi Perlindungan, Pemberdayaan Anak dan Data Informasi;
 - Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka

pelaksanaan tugas desentralisasi di Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (3) ayat (2), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

1.2 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dengan mengkaji situasi dan kondisi baik internal maupun eksternal organisasi, maka ditemukan aspek strategis yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

- a. Etos kerja pegawai perlu ditingkatkan
- b. Kualitas Sumber Daya Aparatur perlu ditingkatkan
- c. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan
- d. Masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- e. Masih rendahnya motivasi masyarakat dalam rangka upaya pemberdayaan;
- f. Kurangnya peran serta lembaga kemasyarakatan dibidang pemberdayaan.
- g. Pengarusutamaan gender pelaksanaannya masih sangat terbatas;

- h. Perlindungan dan pemenuhan hak anak masih terus ditingkatkan untuk menyiapkan mereka menjadi generasi penerus yang sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang;
- i. Komitmen pemerintah serta semua pihak yang terkait terhadap perlindungan perempuan dan anak mendapatkan perhatian secara terus menerus.

BAB II
PERENCANAAN KERJA

2.1 Rencana Strategis SKPD

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu

Visi :

“Mewujudkan Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa Yang Aman, Asri, Dan Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa”

Misi :

1. Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
2. Meningkatnya kualitas hidup keluarga yang sejahtera dan berkeadilan

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Revisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, adalah sebagaimana terdapat dalam table 2.1 dibawah ini :

Table 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatkan Pencapaian Katagori Penghargaan Kota Layak Anak	Meningkatnya Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Membentuk dan memfasilitasi forum anak daerah
				Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Ruang Bermain Ramah Anak
				Melaksanakan Kegiatan Hari Anak Nasional
				Membangun ruang terbuka bermain ramah anak
		Mengkoordinasikan Gugus Tugas KLA		

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				Membentuk Dekela/ Kelana Membuat Pelatihan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Membuat Penyusunan Profil Anak Memfasilitasi Sarana dan Prasarana bagi Anak Berkebutuhan Khusus
	Meningkatkan perlindungan terhadap korban KtP/A	Meningkatnya Penegakan hukum terhadap korban KtP/A	Meningkatkan Pelayanan yang lebih maksimal kepada korban KtP/A	Menyediakan Layanan Bantuan Hukum bagi KtP/A Membentuk Lembaga PATBM Memfasilitasi layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Memfasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Memberikan Layanan Rehabilitasi Sosial
				Membentuk Satuan Tugas Pelayanan Dan Pendampingan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				Korban Indak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
				Menyediakan sarana dan prasarana untuk Rumah Singgah
				Menyediakan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana rumah singga
				Melaksanakan Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
				Melaksanakan Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
				Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Anak
				Melaksanakan Pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk penanganan korban KtP/A
Meningkatnya kualitas hidup	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Melaksanakan pembinaan wawasan politik bagi perempuan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
keluarga yang sejahtera dan berkeadilan				Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG bagi perempuan
				Meningkatkan peran dan posisi perempuan pada jabatan publik
				Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender
				Melaksanakan pembinaan organisasi perempuan
				Melaksanakan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
				Melaksanakan Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
				Melaksanakan Penyuluhan bagi Ibu-ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan diatas selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023 pada table 2.2.

Tabel 2.2
Rencana Strategis Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu
Tahun 2019-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Formula	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Kesetaraan Gender	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan / jumlah angkatan kerja perempuan x 100%	%	44,91	50	51	51,5	52	52,5	52,5
			Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Jumlah kursi perempuan / jumlah total kursi di keanggotaan DPRD x 100%	%	12	16	0	0	0	0	0
Meningkatkan Pencapaian Kategori Penghargaan Kota Layak Anak	Penghargaan Kota Layak Anak	Meningkatnya Pencapaian indikator kelembagaan KLA	Total nilai perolehan Evaluasi KLA	Jumlah capaian KLA / Target capaian x 100%	Poin	0	600	650	700	750	800	800

Meningkatkan perlindungan korban KtP/A	Pendampingan terhadap korban KtP/A	Meningkatnya penegakan hukum terhadap korban KtP/A	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak / Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
----------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 diatas, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada table 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas PP dan PA
Tahun 2019

Indikator Sasaran Renstra	Formula
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$
Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	$\frac{\text{Jumlah kursi perempuan}}{\text{jumlah total kursi di keanggotaan DPRD}} \times 100\%$
Total nilai perolehan Evaluasi KLA	$\frac{\text{Jumlah capaian KLA}}{\text{Target capaian}} \times 100\%$
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak}}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan}} \times 100\%$

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023 diatas, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana pada table 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahunan Dinas PP dan PA
Tahun 2019

Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Target Tahun 2019
Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	50%
	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	16%
Meningkatnya Pencapaian indikator kelembagaan KLA	Total nilai perolehan Evaluasi KLA	600
Meningkatnya Penegakan Hukum Terhadap Korban KtP/A	Meningkatnya penegakan hukum terhadap korban KtP/A	100%

Berdasarkan perencanaan kerja tahunan diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Rencana Kerja Dinas PP dan PA Tahun 2019 sebagaimana pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Rencana Kerja Dinas PP dan PA Tahun 2019

Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Satuan	Anggaran
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Meningkatnya Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	49.624.000,00
Pembinaan wawasan politik bagi perempuan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Wawasan Politik bagi perempuan	Org	49.624.000,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya Lembaga Pemenuhan Indikator KLA	%	86.455.200,00
Hari Anak Nasional	Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Nasional	Org	47.865.200,00
Pembentukan Forum Anak	Terbentuknya Forum Anak	FA	29.250.000,00
Koordinasi Gugus Tugas KLA	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Gugus Tugas KLA	Kali	9.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	%	349.888.500,00
Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Terlaksananya layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Org	114.600.000,00
Meningkatnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Meningkatnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Org	235.288.500,00

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas PP dan PA
Tahun 2019

Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Target Tahun 2019
Meningkatnya Pencapaian Indikator Kelembagaan Kota Layak Anak	Total Nilai Perolehan Evaluasi KLA	600
Meningkatnya Penegakan Hukum Terhadap Korban KtP/A	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	50 %
	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD	16 %

Dalam rangka pencapaian target berdasarkan Perjanjian Kinerja diatas, maka pada tahun 2019 ditetapkan Program dengan alokasi anggaran sebagaimana pada tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.7
Program dan Alokasi Anggaran
Tahun 2019

Program	Anggaran	Ket.
Program Penguatan Kelembagaan, Pengarusutamaan Gender dan Anak	86.455.200,-	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	349.888.500,-	
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	49.624.000,-	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Berikut perbandingan target dan realisasi pencapaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2019.

Tabel 3.1
Sasaran, Indikator Sasaran Renstra, Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Target	Realisasi Kinerja
Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	50%	68,78%
	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	16%	25%
Meningkatnya Pencapaian indikator kelembagaan KLA	Total nilai perolehan Evaluasi KLA	600	625
Meningkatnya Penegakan Hukum Terhadap Korban KtP/A	Meningkatnya penegakan hukum terhadap korban KtP/A	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dapat dijelaskan dengan 4 indikator kinerja sebagai berikut.

1. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Untuk indikator partisipasi angkatan kerja perempuan yang ditargetkan dalam Indikator Renstra tahun ke-1 adalah sebesar 50% dan realisasinya sebesar 68,78% (Data BPS Tahun 2017). Kegiatan penunjang dalam pencapaian indikator ini dirasa cukup untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan tidak sebatas pada pelaksanaan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan saja, tetapi ada banyak kegiatan lain yang harus dioptimalkan untuk pencapaian indicator ini. Hal ini pun bergantung pada besaran anggaran yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu.

2. Kursi Yang di Proporsi Duduki Perempuan di DPRD

Di lihat dari target 16% dan pencapaian 25% maka Perempuan yang berpartisipasi pada partai politik di kotamobagu meningkat. Dengan adanya proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD lebih dari yang sudah di targetkan.

3. Total Nilai perolehan Evaluasi KLA

Pada tahun 2019, Kota Kotamobagu telah mendapatkan Penghargaan KLA Kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2019. Dengan pencapaian ini, maka target kinerja Renstra Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu telah tercapai sebesar 100%.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah dengan memperkuat fasilitasi pelayanan P2TP2A, Pembentukan PUSPAGA dan Fasilitasi serta Advokasi Kota Layak Anak.

4. Meningkatnya Penegakan hukum terhadap korban KtP/A

Adapun cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu adalah sebesar 100%. Artinya semua pengaduan yang diterima oleh P2TP2A telah mendapatkan layanan baik sosial, kesehatan, hukum dan Psikologi.

3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berikut perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dan 2019 berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	400	400	100	50%	68,78%	100%
Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	0	0	0	16%	25%	100%
Total nilai perolehan Evaluasi KLA	Poin	600	600	100%	600	625	100%
Meningkatnya penegakan hukum terhadap korban KtP/A	%	100	100	100	100%	100%	100%

Dari table 3.2 di atas dapat dilihat bahwa tahun 2019, untuk Indikator Kategori Penghargaan KLA belum ditargetkan, nanti ditargetkan pada tahun 2019. Sedangkan Indikator Kinerja Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan telah ditargetkan 45% pada tahun 2017 dan 50% di tahun 2018. Dari uraian tabel dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2017 lebih baik dibanding tahun 2018 sebab angka partisipasi angkatan kerja perempuan masih mengacu pada data BPS tahun 2017 yaitu sebesar 37.14%.

3.1.3 Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Tahun Akhir Renstra

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target tahun akhir Renstra berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 3.3
Target Akhir Renstra dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Target Tahun Akhir Renstra
Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	68,78%	52,5
	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	25%	16
Meningkatnya Pencapaian indikator kelembagaan KLA	Total nilai perolehan Evaluasi KLA	625	800
Meningkatnya Penegakan Hukum Terhadap Korban KtP/A	Meningkatnya penegakan hukum terhadap korban KtP/A	100%	100

Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa hanya satu indikator sasaran yang sesuai dengan Target Tahun Akhir Renstra yaitu Indikator Sasaran Partisipasi angkatan kerja perempuan dan indikator proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD. Sedangkan untuk indikator Total nilai perolehan evaluasi KLA masih belum melewati target akhir renstra.

3.2 Realisasi Anggaran

Target dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu berdasarkan APBD Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp. 1.694.862.026,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.628.249.589,- atau 96.07 %. Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

- Belanja Gaji dan Tunjangan yang di alokasikan sebesar Rp. 1.089.862.026,- realisasi sebesar Rp 1.051.123.253,- atau 96.45%; dan
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS yang di alokasikan sebesar Rp. 605.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 577.126.336,- atau 95.39%.

2. Belanja Langsung

Target dan realisasi belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu secara rinci dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Kotamobagu
Tahun 2019

Program	Anggaran	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	49.624.000,-	82.582.400,-	82.247.900,00	99,59%
Program Penguatan Kelembagaan, Pengarusutamaan Gender dan Anak	86.455.200,-	86.455.200,-	85.814.100	99,25
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	349.888.500,-	358.888.500	356.294.075	99,27

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2019 ini dibuat sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Kota Kotamobagu.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran yang dihasilkan sebesar 90%. Dari hasil pengukuran ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 dalam pencapaian Visi dan Misinya mencapai tingkat yang sangat memuaskan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2019 ini dapat memberi manfaat guna evaluasi pada pencapaian kinerja dimasa yang akan datang.

4.2 Saran Tindak Lanjut

Kedepan dapat dipertimbangkan penambahan alokasi anggaran yang memadai guna pemenuhan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu yang dapat menunjang Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan.